

Gelar Konsultasi Publik RKPD, Pemkab Bombana usung 4 Skala Strategis

Bombana, SultraNET. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, bertempat di Gedung Tanduale Kantor Bupati Bombana, Kamis (25/02/2023)

Pada penyusunan RKPD Bombana tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan empat skala prioritas pembangunan yaitu pada point pertama skala prioritas I yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah dalam upaya penataan wajah kota dan pemerataan hasil pembangunan.

Adapun Prioritas II yaitu peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis peningkatan nilai tambah sektor keunggulan daerah, Prioritas III yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan di daerah dan Prioritas IV yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik berkualitas.

Pj. Bupati Bombana, Burhanuddin dalam sambutannya mengingatkan agar dalam penyusunan program-program di daerah harus menyesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

“ Yang harus di ingat, kembangkan potensi kita melalui perencanaan pembangunan, jangan buat perencanaan yang susah dijangkau, secara teori bagus tapi sulit dijangkau,” ujar Burhanuddin.

Mantan Pj. Bupati Konawe Kepulauan itu meminta semua pihak untuk menjadikan kesempatan Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten sebagai media kolaborasi stakeholder untuk mensejahterakan masyarakat dan menjawab masalah yang dihadapi.

“Ayo mulai perencanaan yang mudah direalisasikan, melihat sasaran pembangunan secara objektif dan sesuaikan dengan data yang akurat,” tegasnya

Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim. ia menjelaskan Forum Konsultasi Publik RKPD ini menjadi pondasi penetapan APBD Bombana. Olehnya itu, pihaknya mengharapkan kolaborasi dan kerjasama dalam menyusun program-program yang sesuai dengan cita-cita Undang-Undang yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

“Setelah tahapan forum konsultasi ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan musrenbang secara bertahap dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dimana dari usulan-usulan yang diterima dari masyarakat ditampung dan di analisa baik-baik mana yang menjadi priotitas utama,” singkat Husrifnah. (IS)